LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AKUNTAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AKUNTAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

DAFTAR ISI

Bagian I Surat Pernyataan Direksi

Bagian II Laporan Auditor Independen

Bagian III Laporan Keuangan

- Laporan Posisi Keuangan..... 1
- Laporan Laba Rugi..... 2
- Laporan Perubahan Ekuitas..... 3
- Laporan Arus Kas..... 4

Bagian IV Catatan atas Laporan Keuangan 5

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

JL.BASUKI RAHMAT, MARABAHAN, KAB.BARITO KUALA 70511

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mandrex**
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat, Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Jabatan : Pjs. Direktur

Untuk dan atas nama PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri;
2. Laporan keuangan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri tanggal 31 Desember 2025 yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan Keuangan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Marabahan, 14 Juli 2026

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 4CAA6ANX346523046

Mandrex
Pjs. Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Gemi Ruwanti

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00009/2.1197/AU.8/06/1540-1/1/VII/2026

Kepada Yth.
Dewan Direksi, Pengawas dan Pemegang Saham
PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
di Marabahan

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Perusahaan belum mencadangkan kewajiban imbalan pasca kerja karyawan sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang Imbalan Kerja dalam Laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Penerapan SAK EP Bab 28 tersebut seharusnya disajikan dalam laporan keuangan untuk kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Kemudian untuk akun Utang Lain-lain yaitu Utang kepada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, kami tidak dapat melaksanakan prosedur audit dan prosedur audit alternatif lainnya karena kami tidak mempunyai bukti transaksi yang memadai atas saldo akun utang tersebut sebesar Rp45.319.312,00, sebagai akibatnya kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun tersebut.

Disamping itu, audit kami tidak meliputi aspek perpajakan dan oleh karenanya kami tidak memeriksa kepatuhan pos-pos yang menyangkut perpajakan seperti yang diatur pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 29 tentang Pajak Penghasilan.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada

laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Hal Lain

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian pada Catatan 2a dan 2b atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, diaudit oleh auditor pendahulu dengan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 23 April 2026.

Informasi Selain Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Terkait

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami meyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkpannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relavan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menetukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Gemi Ruwanti, CPA

00009

Dr. Gemi Ruwanti, M.Si., Ak., CA., CPA.
Nomor Reg. Akuntan Publik : No. AP : 1540
Nomor Ind. Certified Public Accountant : C - 002184

14 Juli 2026

LAPORAN KEUANGAN

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	*Catatan*		*31 Des 2025 (Rp)*		*31 Des 2024 (Rp)*
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	*2d*	*3*	Rp 8,348,269	Rp	49,124,532
Piutang Lain-Lain	*2e*	*4*	Rp 556,202,591	Rp	289,109,180
Jumlah Aset Lancar			**Rp 564,550,860**	**Rp**	**338,233,712**
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi sebesar Rp15.913.000,00 dan RpRp15.913.000,00 per 31 Desember 2025 dan 2024)	*2f*	*5*	Rp -	Rp	-
Aset Lain-Lain		*6*	Rp 2,500,000,000	Rp	2,500,000,000
Jumlah Aset Tidak Lancar			**Rp 2,500,000,000**	**Rp**	**2,500,000,000**
JUMLAH ASET			**Rp 3,064,550,860**	**Rp**	**2,838,233,712**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang Lain-Lain	*2g*	*7*	Rp 480,516,175	Rp	45,319,312
Pendapatan Diterima Dimuka	*2g*	*8*	Rp 131,000,000	Rp	131,000,000
Jumlah Liabilitas			**Rp 611,516,175**	**Rp**	**176,319,312**
EKUITAS					
Modal Setor		*9*	Rp 2,500,000,000	Rp	2,500,000,000
Saldo Laba		*10*	Rp (46,965,315)	Rp	161,914,400
Jumlah Ekuitas			**Rp 2,453,034,685**	**Rp**	**2,661,914,400**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			**Rp 3,064,550,860**	**Rp**	**2,838,233,712**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Marabahan, 14 Juli 2026

Mandrex
Pjs. Direktur Utama

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	*Catatan*		*31 Des 2025 (Rp)*		*31 Des 2024 (Rp)*
PENDAPATAN USAHA	*2h 11*	Rp	502,014,661	Rp	528,992,716
BEBAN POKOK USAHA	*2h 12*	Rp	276,108,064	Rp	290,950,000
LABA (RUGI) KOTOR		**Rp**	**225,906,597**	**Rp**	**238,042,716**
BEBAN USAHA					
Beban Administrasi dan Umum	*2h 13*	Rp	268,766,880	Rp	207,601,357
Jumlah Beban Usaha		**Rp**	**268,766,880**	**Rp**	**207,601,357**
LABA (RUGI) USAHA		**Rp**	**(42,860,283)**	**Rp**	**30,441,359**
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA					
Pendapatan Lain-lain	*2h 14*	Rp	125,579	Rp	34,732
Beban Lain-lain	*2h 14*	Rp	744,278	Rp	418,818
Jumlah Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha		**Rp**	**(618,699)**	**Rp**	**(384,086)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**Rp**	**(43,478,982)**	**Rp**	**30,057,273**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Kini		Rp	-	Rp	-
Pajak Tangguhan		Rp	-	Rp	-
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**Rp**	**(43,478,982)**	**Rp**	**30,057,273**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**Rp**	**(43,478,982)**	**Rp**	**30,057,273**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Marabahan, 14 Juli 2026

Mandrex
Pjs. Direktur Utama

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian		Modal Setor		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2024	**Rp**	**2,500,000,000**	**Rp**	**(157,252,083)**	**Rp**	**2,342,747,917**
Kenaikan/Penurunan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Koreksi Laba	Rp	-	Rp	289,109,210	Rp	289,109,210
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	-	Rp	30,057,273	Rp	30,057,273
Penghasilan Komprehensif Lain	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**2,500,000,000**	**Rp**	**161,914,400**	**Rp**	**2,661,914,400**
Saldo per 1 Januari 2025	**Rp**	**2,500,000,000**	**Rp**	**161,914,400**	**Rp**	**2,661,914,400**
Kenaikan/Penurunan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Koreksi Laba	Rp	-	Rp	(165,400,733)	Rp	(165,400,733)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	-	Rp	(43,478,982)	Rp	(43,478,982)
Penghasilan Komprehensif Lain	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**2,500,000,000**	**Rp**	**(46,965,315)**	**Rp**	**2,453,034,685**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PD PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian		*31 Des 2025 (Rp)*		*31 Des 2024 (Rp)*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	Rp	(43,478,982)	Rp	30,057,273
Penyesuaian untuk:				
- Penyusutan Aset Tetap	Rp	-	Rp	1,346,625
- Koreksi Saldo Laba	Rp	(165,400,733)	Rp	289,109,210
- Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp	-	Rp	-
Perubahan Modal Kerja:				
- Penurunan/(Kenaikan) Piutang Lain-Lain	Rp	(267,093,411)	Rp	(58,568,639)
- Kenaikan/(Penurunan) Utang Lain-Lain	Rp	435,196,863	Rp	(214,797,298)
- Kenaikan/(Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	-	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**Rp**	**(40,776,263)**	**Rp**	**47,147,171**
AKTIVITAS INVESTASI				
- Penurunan/(Kenaikan) Aset Tetap	Rp	-	Rp	-
- Penurunan/(Kenaikan) Aset Lain-Lain	Rp	-	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
AKTIVITAS PENDANAAN				
- Modal Setor	Rp	-	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
Kenaikan (Penurunan) Bersih dari Kas dan Setara Kas	**Rp**	**(40,776,263)**	**Rp**	**47,147,171**
Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp	49,124,532	Rp	1,977,361
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	**Rp**	**8,348,269**	**Rp**	**49,124,532**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri ("Perusahaan") berkedudukan di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri. Perusahaan bergerak di bidang kepelabuhanan dan sesuai surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Nomor PU.60/10/3/DP.10 tanggal 26 Mei 2010 perihal permohonan pembentukan BUP terlebih dahulu dengan melengkapi persyaratan antara lain Akta Pendirian Perusahaan yang bergerak dibidang kepelabuhan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 20029 dalam BAB III, Bagian Ketiga, Pasal 5 dinyatakan Tugas Pokok Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang kepelabuhanan yang meliputi jasa kapal, jasa barang, jasa teknis, jasa umum, perencanaan, pemasaran serta manajemen SDM dan keuangan.
2. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direktur yang berada dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas dan bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 dalam BAB III, Bagian Keempat, Pasal 6 dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 5 ayat (1) di atas, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan jasa kapal
2. Penyelenggaraan pelayanan jasa barang
3. Penyelenggaraan pelayanan jasa Teknik
4. Penyelenggaraan pelayanan jasa umum
5. Penyelenggaraan perencanaan pengelolaan kepelabuhanan
6. Penyusunan program pemasaran jasa kepelabuhanan
7. Pengelolaan manajemen SDM dan keuangan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung dengan perizinan berupa:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.
3) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 506 A Tahun 2014 tanggal 2 September 2014 tentang Pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri pada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.
4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.701.001.4-731.000.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Jalan Basuki Rahmat, Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Modal Perusahaan

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian pada Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan pada Tahun 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2013 tanggal 24 September 2013, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Barito Kuala Mandiri. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyetorkan penyertaan modal dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahap	Penyertaan Modal Dari	Tanggal	Jumlah Modal Disetor
I	Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala	08 Oktober 2013	1.000.000.000
II	Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala	28 Februari 2014	1.000.000.000
III	Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala	05 November 2014	500.000.000
			2.500.000.000

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 506 A tahun 2014, tanggal 02 September 2014, tentang Pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri pada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, perusahaan telah menyetorkan modalnya melalui penguasaan saham PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri sebanyak 25.000 lembar saham dengan nominal Rp100.000,- per lembar saham sehingga berjumlah sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun penyertaan Modal PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri kepada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, sebagai berikut:

Tahap	Penyertaan Modal Kepada	Tanggal	Jumlah Modal Disetor
I	PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	23 Oktober 2013	1.000.000.000
II	PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	28 Februari 2014	1.000.000.000
III	PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	05 November 2014	500.000.000
			2.500.000.000

Kemudian sebagai informasi tambahan, susunan pemegang saham PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT PBKM), sesuai dengan Akta Notaris Henny Rupiyanti, SH nomor 30, tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Modal Perusahaan (Lanjutan)

Pemegang Saham	Jumlah saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	25.000	50,00%	2.500.000.000
Budi Darmawan	7.500	15,00%	750.000.000
PT Terminal SRE	12.500	25,00%	1.250.000.000
H. Muhammad Zain	5.000	10,00%	500.000.000
Saldo	**50.000**	**100,00%**	**5.000.000.000**

Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 506 A tahun 2014, tanggal 02 September 2014, BAB IV pasal 8, Sisa Hasil Usaha diatur sebagai berikut :

1. Bagian laba yang diperoleh dari PT berupa pembagian Dividen selama tahun buku dari Hasil Usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Hak Daerah dan harus diserahkan ke Daerah dengan mekanisme pembagian 55% disetorkan ke kas daerah dan 45% sebagai biaya operasional Perusahaan Daerah;
2. Hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini yang disetorkan ke kas daerah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Tata cara penyetoran ke kas daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/409/KUM/2025 tanggal 04 Agustus 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Sementara Direktur serta Manager PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, terhitung mulai 13 Agustus 2025 sampai dengan 13 Januari 2026 selama 6 Bulan dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/164/KUM/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Periode 2025-2029, maka Susunan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2025 sebagai berkut:

Dewan Pengawas :

a. Dewan Pengawas : 1. Joko Sumitro, S. Sos., MA.
2. Yogi Adhiatma

Dewan Direksi :

a. Penjabat Sementara Direktur Utama : Mandrex

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Mulai 1 Januari 2025, PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menerapkan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) yang menggantikan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri memenuhi kriteria sebagai entitas privat untuk tahun buku 2025. Perusahaan menerapkan SAK EP dalam melakukan pengakuan,

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

a. Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Lanjutan)

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi. Penerapan dilakukan sesuai ketentuan transisi dalam SAK EP.

b. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK EP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan Tahun 2025 dengan angka komparatif Tahun 2024 telah disajikan dengan SAK EP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

c. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) dan penentuan posisi keuangan (Laporan Posisi Keuangan) dilakukan dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Dengan metode akrual diartikan bahwa pembukuan tidak hanya sekedar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, akan tetapi pencatatan terhadap setiap perubahan aset dan kewajiban, demikian pula pendapatan dan beban, pada saat terjadinya atau diakuinya perubahan.

Laporan arus kas Perusahaan disusun menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dan dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Piutang

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha disajikan sebesar nilai tunai yang dapat direalisasikan. Jumlah estimasi piutang usaha yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih dibuatkan cadangan dalam jumlah yang layak berdasarkan umur piutang dengan persentase tertentu.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Piutang (Lanjutan)

Piutang lain-lain merupakan jumlah yang terutang dari karyawan, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya yang belum diterima pelunasannya pada akhir periode bersangkutan. Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan jangka waktu pelunasan bervariasi. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang maka piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang disajikan sebesar nilai tunai yang dapat direalisasikan. Piutang akan dihapuskan apabila piutang yang bersangkutan dipastikan tidak akan dapat tertagih.

f. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut :

	Tahun
Inventaris Kantor	4

Setiap aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Akumulasi harga perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan dan penyusutan mulai dibebankan pada saat itu.

g. Kewajiban

Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun yang terdiri atas utang usaha, utang non usaha, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, utang pembiayaan, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun bersangkutan dan kewajiban jangka pendek lainnya yang akan segera dibayar.

Kewajiban tidak lancar merupakan kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun buku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Pendapatan utama berasal dari pembagian dividen atas investasi jangka panjang kepada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.

Beban pokok adalah setoran bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi (basis akrual), sedangkan untuk pengakuan beban yang bersifat periodik dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar di muka.

i. Perpajakan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini yang terutang didasarkan pada laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan.

Pajak tangguhan diakui atas selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya (yang dikenal sebagai perbedaan temporer). Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer kena pajak). Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer yang dapat dikurangkan), tetapi hanya sepanjang terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan penilaian kini terhadap laba kena pajak di masa depan. Setiap penyesuaian diakui dalam laba rugi.

Pajak tangguhan dihitung pada tarif pajak yang diperkirakan berlaku atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode di mana entitas memperkirakan aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Kas		
Kas	-	-
Jumlah	**-**	**-**
Bank		
Bank Kalsel (2003972073/0120007005126)	8.348.269	49.124.532
Jumlah	**8.348.269**	**49.124.532**
Saldo Kas dan Setara Kas	**8.348.269**	**49.124.532**

Saldo kas dan setara kas Perusahaan seluruhnya tidak dibatasi penggunaannya.

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Piutang kepada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri		
Piutang Dividen	191.712.462	-
Piutang Pajak Dividen	364.411.379	289.109.180
Jumlah	**556.123.841**	**289.109.180**
Piutang Karyawan		
Bapak Mandrex	78.750	-
Jumlah	**78.750**	**-**
Saldo Piutang Lain-Lain	**556.202.591**	**289.109.180**

5. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2025	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Inventaris Kantor	15.913.000	-	-	15.913.000
Jumlah	**15.913.000**	**-**	**-**	**15.913.000**

Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	(15.913.000)	-	-	(15.913.000)
Jumlah	**(15.913.000)**	**-**	**-**	**(15.913.000)**
Nilai Buku	**-**	**-**	**-**	**-**

31 Desember 2024	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Inventaris Kantor	15.913.000	-	-	15.913.000
Jumlah	**15.913.000**	**-**	**-**	**15.913.000**
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	(14.566.375)	(1.346.625)	-	(15.913.000)
Jumlah	**(14.566.375)**	**(1.346.625)**	**-**	**(15.913.000)**
Nilai Buku	**1.346.625**	**(1.346.625)**	**-**	**-**

Beban penyusutan aset tetap pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.346.625,00.

6. ASET LAIN-LAIN

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang - PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Aset Lain-Lain	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**

7. UTANG LAIN-LAIN

Jumlah tersebut merupakan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Utang kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala		
Setoran Bagi Hasil ke Pemkab. Barito Kuala	234.691.854	-
Hak Pemkab. Batola atas Piutang Pajak Dividen PD PBKM kepada PT PBKM	200.426.259	-
Jumlah	**435.118.113**	**-**
Utang kepada PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	**45.319.312**	**45.319.312**
Utang Pajak PPh 21	**78.750**	**-**
Saldo Utang Lain-Lain	**480.516.175**	**45.319.312**

8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka - Dividen	131.000.000	131.000.000
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka	**131.000.000**	**131.000.000**

9. MODAL SETOR

Jumlah tersebut merupakan saldo modal setor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Modal Setor	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**

10. SALDO LABA

Jumlah tersebut merupakan saldo laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Laba (Rugi) Ditahan	161.914.400	(157.252.083)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(43.478.982)	30.057.273
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
Koreksi Laba	(165.400.733)	289.109.210
Saldo Laba	**(46.965.315)**	**161.914.400**

11. PENDAPATAN USAHA

Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Pembagian Dividen dari PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	502.014.661	528.992.716
Jumlah Pendapatan Usaha	**502.014.661**	**528.992.716**

12. BEBAN POKOK USAHA

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban pokok usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Setoran Bagi Hasil ke Pemkab. Barito Kuala	276.108.064	290.950.000
Jumlah Beban Pokok Usaha	**276.108.064**	**290.950.000**

13. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan	255.750.000	203.200.000
Beban Pos & Materai	100.000	-
Beban ATK & Fotokopi	184.000	54.000
Beban Utilities/Listrik/Air/Telepon	603.000	1.015.000
Beban Perjalanan Dinas	6.052.102	-
Beban Perlengkapan Kantor	664.950	-
Beban Jasa Konsultan & Profesional	1.500.000	-
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	-	1.346.625
Beban Denda/Sanksi Pajak	127.828	420.000
Beban Pemeliharaan Gedung	2.022.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.200.000	-
Beban Lain-Lain	563.000	127.702
Beban PPh Pasal 29 (Tahun 2023)	-	1.438.030
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**268.766.880**	**207.601.357**

14. PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA

Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan (beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	31-12-2025 (Rp)	31-12-2024 (Rp)
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	74.388	34.089
Pendapatan Lain-Lain	51.190	643
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**125.579**	**34.732**
Beban Lain-Lain:		
Beban Administrasi Bank	729.400	412.000
Beban Pajak atas Jasa Giro	14.878	6.818
Jumlah Beban Lain-Lain	**744.278**	**418.818**

15. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/48/KUM/2026 tentang Penetapan Pejabat Sementara Direktur Serta Manager PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri tanggal 19 Januari 2026 sebagai berikut:

Nama : Mandrex
Jabatan : Pejabat Sementara Direktur Utama

Nama : Noviridhany Maulana Azhar, SE, MM
Jabatan : Pejabat Sementara Manager SDM & Keuangan

Penetapan ini terhitung mulai 19 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

16. TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diselesaikan pada tanggal 14 Juli 2026.